

KIPRAH

Polemik Sekolah Negeri: Banyak Peminat, Minim Dayaampung



Banyak peminat di sekolah negeri.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan program pendidikan rasional. Hal ini tentunya sejalan dengan hak masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan serta kualitas sarana dan prasarana yang baik. Pemerintah sudah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah.

Ketersediaan sebagai indikator sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi tentu akan menimbulkan masalah. Seperti yang terjadi di Batam pada tahun 2016 lalu, di mana jumlah siswa peserta didik Kota Batam terus bertambah signifikan pada tahun 2016, dengan jumlah 174.044 siswa

dan prasarana. Tingginya pertumbuhan masyarakat berdampak di sekolah negeri realisasi kuota yang berdampak pada lokasi, ruang ruang kelas. Untuk mengatas hal ini, maka sekolah berinovasi mengoptimalkan fungsi beberapa ruangan seperti laboratorium menjadi ruang kelas. Penyediaan sarana pendidikan yang memadai di Kota Batam bersumber dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010.

Hasil kajian sebagai pelayanan publik terhadap kondisi prasarana ruangan minimal yang ada pada satuan pendidikan di Kota Batam, ternyata pada lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama, menunjukkan bahwa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya tentang pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kota Batam sehingga menimbulkan kebutuhan meningkatkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Data yang diambil dari Kecamatan Batam kota misalnya, SDN 005 teramat melimpah jumlah siswa sebanyak 1.514 orang untuk 34 rombongan belajar. Sedangkan SD Soerba Kirana Tabito dengan jumlah 158 siswa memiliki

jumlah rombongan belajar. Artinya, SDN 005 rata-rata kelasnya diisi sebanyak 44,5 siswa, sementara SD Kirana Tabito hanya ada sekitar 22,6 siswa setiap kelasnya. Akibatnya, sekolah negeri mengalami kekurangan siswa dan sebagian siswa terpaksa masuk ke sekolah swasta yang lebih baik daripada sekolah negeri.

Berangkat dari permasalahan ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Kota Batam, yaitu: pertama, mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada di sekolah negeri; kedua, memperbaiki sarana dan prasarana serta menambah jumlah ketersediaan sarana pendidikan dengan jumlah siswa peserta didik; ketiga, mengoptimalkan peran dan peranan satuan pendidikan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam; keempat, membatasi jumlah peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan mengontrol peserta didik yang belum dapat diampung ke dalam pendidikan swasta.

Keempat, memperbaiki sarana dan prasarana dengan tidak memindahkan lokasi atau tidak memindahkan lokasi kelas yang ada dalam pendidikan negeri apabila tidak terdapat pemecahan yang dapat lebih baik ketimbang pendidikan swasta dan prasarana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

KIPRAH

PPDB RAWAN PROTES, OMBUDSMAN GANDENG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM



LAGAT SABARI

Berikut gambar: info@ombudsman.go.id

Pengumuman Penempatan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Batam pada Mei 2019, sudah berlangsung dari orang tua calon siswa yang tidak terima. Ini protes dari orang tua calon siswa bahkan didominasi oleh pemukiman urban menengah-jumlah siswa melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Padahal, area zona yang dibatasi sudah lebih luas sehingga pilihan sekolah menjadi lebih banyak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kantor Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau mengupayakan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mencari solusinya. Laga Pemuda Sabari, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau mengoptimalkan orang tua untuk mendaftar di Ombudsman siswa yang memiliki pendaftaran (jika memang sudah memiliki keabsahan). Tujuannya, agar proses pendaftaran siswa pendidikan yang lebih baik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henni Arulan mengatakan pihaknya dengan stakeholder yang lain telah bersikap untuk hal yang mungkin terjadi. Menurutnya, kondisi sekolah yang belum merata memang sudah menjadi permasalahan di Batam. Oleh karena itu, saat ini tidak terdapat sudah dapat dengan memperhatikan area zona sehingga orang tua bisa memilih sekolah A atau B yang berbeda dari rumah.

Tetapi juga memastikan bahwa jika ada, ke depannya sebagai pemangku pendidikan lanjutan karena siswa pendidikan di Kota Batam merata, bisa lebih luas memonitoring atau membangun sekolah di mana karena telah diterbitkan di Batam, papar Arulan. Selain itu, Arulan juga mengemukakan akan meninjau kembali komitmen mereka dalam pengoptimalan PPDB dengan tetap menjaga ke lapangan dan memonitor lapangan ke pemerintah.

SUARA PUBLIK OMBUDSMAN PAPUA BARAT REKRUIT SOBAT OMBUDSMAN



Berikut gambar: info@ombudsman.go.id

Ombudsman Papua Barat melalui pelaksanaan Perencanaan Berbasis Sobat Ombudsman Tahun 2019 pada Jumat, 10 Mei 2019, berhasil yang mengoptimalkan bentuk merupakan masyarakat umum yang peduli dengan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat sebagai Sobat Ombudsman. Hal tersebut diumumkan oleh Anghy Proseya, Penanggung Jawab Partisipasi Masyarakat (PI) Pemas Ombudsman Papua Barat.

Perencanaan Sobat Ombudsman Tahun 2019 ini, dilakukan secara terbuka. Sebelumnya di tahun 2018, Ombudsman sudah memiliki Sobat dari kalangan pelajar, mahasiswa dan anak muda. Tahun ini, perkebun Sobat secara umum untuk seluruh bagian masyarakat yang memiliki kepedulian penuh terhadap pelayanan publik di Provinsi Papua Barat. "Kami berharap hal ini menjadi motivasi yang baik bagi masyarakat, bahwa masyarakat kita berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Sobat, Ombudsman dalam melaksanakan tugas tersebut baik dari SDN di perkotaan maupun di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang cukup luas," tutur Anghy.

Ruko Rumbewek, PI, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, menyatakan bahwa hal yang menginspirasi adalah masyarakat yang peduli dengan pelayanan publik di Kabupaten RI, Nariina, selaku Sobat Ombudsman RI akan dilantik dalam kegiatan Training Of Trainers (TOT) sehingga lebih memahaminya fungsi serta kewenangan Ombudsman sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Ombudsman di masyarakat. Selain itu, diharapkan juga menjadi pendamping masyarakat untuk melacak ke Ombudsman apabila mengalami tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik.



Berikut gambar: info@ombudsman.go.id

SUARA PUBLIK SMA 1 Sembalun Akhirnya Luluskan Aldi

Usaya serumpah pihak dalam memperjelas keluhan Aldi lipen telah membuahkan hasil. Pihak sekolah, SMA 1 Sembalun Lombok Timur menyetujui Aldi lipen pada Sabtu, 25 Mei 2019. Asisten Ombudsman Bidang Penanganan Laporan, Sabudina, di mana menyatakan, pihaknya sudah menanggapi dengan menenggal karena pihak sekolah telah bersedia menerima. Pihak sekolah, sebagai pihak terlapor dipanggil pada 22 Mei lalu. Sabudina menjelaskan bahwa pada masalah masalah ini dipicu oleh Aldi yang dilantik mengantarinya kepada sekolah tentang ketidaklulusannya.

Penyerahan Dampak kelulusan yang dibagikan Ombudsman

NTB ini, dihadiri oleh tim kuasa hukum Aldi, Lembaga Pertahanan Anak (LPA) NTB, dan juga Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. Asisten Kepala Siskin 1 Sumbawa Deden Ali, P.M, P.MJ bernama Deden Guu hadir sebagai pembicara yang memberikan tanda kelulusan. Penyerahan yang dilaksanakan sekitar pukul 10.25. Pihak sekolah menyatakan bahwa orang tua Aldi dan keluarga di awal sekolah. Penyerahan tanda kelulusan juga dilakukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H. Ruman.

1 Mude Nurta A dan LPMP NTB juga menerima. Berkatnya kasus penyelesaian masalah ini

PROFIL

Kembali dari Belanda untuk Mengabdikan di Kampung Halaman

Universiteit Leiden

Kamerlingh Onnes

Faculteit der
Rechtsgeleerdheid

Leiden Law School

Setelah lima dan menandatangani gelar sarjana, banyak yang beranggapan bahwa menantu asalan paman yang baik. Harapannya mencukupi keinginannya. Laporan paman besar membuat kita mengabaikan kemungkinan kemungkinan lain. Laporan paman besar membuat kita mengabaikan kemungkinan lain dan apresiasi tinggi biasanya menjadi alasan banyak orang untuk bekerja di kota Belanda dengan Huis van Sassen, Asisten Ombudsman, yang pernah bekerja untuk paman di daerah ayahnya (Bukitpagan, Kalimantan Timur) dan tinggal di desa kedua orangtuanya.

Sebenarnya faktor keluarga, itu juga punya keinginan untuk mengabdikan diri membangun daerah, karena pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang akhirnya memulainya untuk melanjutkan ke Jakarta dan juga ada yang pulang ke Kalimantan untuk mengabdikan diri.

Pada saat yang sama setelah lima menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, berlibur ke rumah kakek di Kantor Ombudsman RI di kawasan Kalimantan Timur. Sebagian harapan baiklah dipaparkan setelah mendapat info diterima di Ombudsman.

"Ada beberapa aspek profesional yang melebihi ekspektasi saya, misalnya dinamika pekerjaan di Ombudsman yang membuat saya selalu merasa tertantang dan perlu untuk memperbaharui pengetahuan saya dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada bidang hukum."

Di tengah pekerjaannya sebagai Asisten, ada sebagian harapan lainnya yang ingin ia capai setelah kembali mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya, yaitu melanjutkan pendidikan S2. Bahkan, ia telah membuat target untuk melaksanakannya pada tahun kedua di Ombudsman untuk menunjang pengembangannya ke arah yang lebih maju.

Namun, pengalamannya tidak selalu mulus hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Mula dari dibantu oleh paman Ombudsman pada periode itu karena Kantor Persidangan Kalimantan Timur sangat minim SDM, hingga harus ditunggu yang harus dibicarakan untuk persiapan selama kurang lebih satu tahun.

Awalnya, ia mendaftar di program studi Public

International Law, Universitas Utrecht. Namun, pada akhirnya ia mengubah pilihan ke Universitas Leiden dengan program studi yang sama, dengan pertimbangan menjadi dosen pengajar yang lebih tinggi pada tingkat Belanda merupakan tujuan.

"Sedikit motivasi pengembangan karir dan keagamaan, motif utama yang masih masih kuat pada saat itu."

Namun, pengalamannya tidak selalu mulus hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Mula dari dibantu oleh paman Ombudsman pada periode itu karena Kantor Persidangan Kalimantan Timur sangat minim SDM, hingga harus ditunggu yang harus dibicarakan untuk persiapan selama kurang lebih satu tahun.

Awalnya, ia mendaftar di program studi Public

International Law, Universitas Utrecht. Namun, pada akhirnya ia mengubah pilihan ke Universitas Leiden dengan program studi yang sama, dengan pertimbangan menjadi dosen pengajar yang lebih tinggi pada tingkat Belanda merupakan tujuan.

"Sedikit motivasi pengembangan karir dan keagamaan, motif utama yang masih masih kuat pada saat itu."

Namun, pengalamannya tidak selalu mulus hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Mula dari dibantu oleh paman Ombudsman pada periode itu karena Kantor Persidangan Kalimantan Timur sangat minim SDM, hingga harus ditunggu yang harus dibicarakan untuk persiapan selama kurang lebih satu tahun.

Awalnya, ia mendaftar di program studi Public

International Law, Universitas Utrecht. Namun, pada akhirnya ia mengubah pilihan ke Universitas Leiden dengan program studi yang sama, dengan pertimbangan menjadi dosen pengajar yang lebih tinggi pada tingkat Belanda merupakan tujuan.

"Sedikit motivasi pengembangan karir dan keagamaan, motif utama yang masih masih kuat pada saat itu."

Namun, pengalamannya tidak selalu mulus hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden, Belanda. Mula dari dibantu oleh paman Ombudsman pada periode itu karena Kantor Persidangan Kalimantan Timur sangat minim SDM, hingga harus ditunggu yang harus dibicarakan untuk persiapan selama kurang lebih satu tahun.

Awalnya, ia mendaftar di program studi Public

PERISTIWA

Ombudsman Bahas Kawasan Otorita Batam bersama Komisi II DPR



Ruang pertemuan Ombudsman RI

Ketua Ombudsman RI, Amulian Rifa'i, bersama Laila Ida, Rika Khariza, Dadi Supriyo Suhartono, dan Alan Lie, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (13/5). Rapat ini membahas laporan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Batam. Dalam salah satu poin kesimpulan hasil rapat, menyebutkan bahwa Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI sepakat meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan rencana pengalihan Wilayah Batam sebagai Ex-Officio Badan Pengusahaan (BP) Batam karena bertentangan Undang-Undang.

Selain itu, hasil rapat juga mendorong Pemerintah agar membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Batam. Harapannya pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP KPBB Batam dapat diatur dengan jelas.

Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR RI turut meminta Ombudsman RI untuk memonitoring kegiatan rapat dengan tujuan menginformasikan kepada Masyarakat RI terkait hasil-hasil penyelesaian masalah Batam. Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kadis Provinsi Kepulauan Riau, Kadis Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Tim Penilai Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjad-Mada.

PERISTIWA

Ombudsman RI Raih Predikat Opini WTP dari BPK



Ruang pertemuan Ombudsman RI

Severitas Jenderal Ombudsman RI, Supriyo Suhartono, menerima predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018 dengan predikat opini WTP. Tanpa Pengawasan (WTP) yang diberikan secara menyeluruh oleh Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Adhunan Queso di Auditorium Lertis II, Kantor BPK, Jalan Gajah Mada, Jakarta, pada Juni 2019 lalu.

Pada proses tersebut, Auditor Queso didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Utama) III BPK, Sitor W. Rajagukguk, menyenahkan WTP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2018 kepada 38 Kementerian/Lembaga dan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian di lingkungan pemerintahan Auditorial Keuangan Negara (AUN) III BPK.

Dalam sambutanannya, Anggota II BPK mengapresiasi kebermanakmubtihan yang menunjukkan pertambahan dalam hal akurasi data dan transparansi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2018 pada 38 Kementerian/Lembaga tersebut, tidak ada yang mendapat opini Tidak Memenuhi Perspektif (Tidaklayar).

Tahukah kamu Ombudsman Berhak Merahasiakan Identitas Pelapor?

1. Ombudsman RI
2. Ombudsman RI
3. Ombudsman RI
4. Ombudsman RI

KILAS

Ombudsman Adakan Pelatihan Propartif



Berkas gambar: Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia berencana akan mengrombukan pendistribusian propartif atau progresif dan partisipatif di beberapa perwakilan seperti yang sudah diujicobakan dalam satu tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Dason S. Sulanowati pada Jumat, 3 Mei 2019, saat menghadiri Pelatihan dan Workshop Propartif di Hotel Wisma Frame Hotel Bogor.

Menurut Dason, Kegiatan Workshop dan Pelatihan Propartif yang digelar pada 28 April hingga 3 Mei 2019 ini, diharapkan mampu meningkatkan penerapan dan metode dalam penanganan kasus insaan Ombudsman di bidang masing-masing. Selain itu, diharapkan dengan soft skill yang dibagikan dapat membuat internal Ombudsman dan publik lebih mendapatkan perhatian yang ada dan mengubah mind-set atau yang sudah tidak.

Dason juga menjelaskan pelaksanaan propartif adalah salah satu metode yang digunakan Ombudsman untuk mempermudah penyusunan laporan masyarakat, yang bertujuan pada tujuan sederhana dan bukan hanya pada prosedur semata. "Metode adanya inovasi di dalam pendekatan penyelesaian laporan masyarakat. Untuk itu, akan ada komitmen CBI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia termasuk mendorong Halal-hal ini adalah mengrombukan CBI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia," jelas Dason.

Sementara itu salah satu Instruktur propartif yang juga PHL Kepala Penanganan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Sarudin Hudu, menerangkan bahwa propartif adalah salah satu metode efektif yang sudah diujicoba di beberapa perwakilan dan mampu membuat para pihak lebih "dimensuasi".

Hal ini dikarenakan pendekatan propartif membuat pelapor dan penyelenggara insaan merasa diperhatikan atau peduli. Sehingga penting bagi Ombudsman untuk fokus terhadap peningkatan dan pembangunan kualitas pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan langkah propartif "Mendengarkan Hati Mencari Solusi", menjadikan metode ini mudah diterapkan di berbagai tempat ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hudu, salah satu peserta Training dari Humas Ombudsman RI. Menurutnya, metode propartif merupakan alternatif pendekatan yang sangat bagus dalam menghadapi sengketa. Sehingga mudah untuk diterapkan karena manfaatnya langsung dapat dirasakan.

Selain dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI seperti Ahmad Nurwahid, "Samah", Nera Bahayu,



Berkas gambar: Ombudsman

dan Prof. Adnanus Melaku, Kegiatan Pelatihan dan Workshop Propartif ini juga dihadiri trainer dari Vice Rektor Nasional (VPRN), Trainer dari Vice Chancellor Belanda, bagian kepelatihan, Asisten Ombudsman

Isiding Perencanaan, dan Asisten laporan (VPU).

KILAS

Rangkai Kebersamaan & Keragaman di Halalihalal Ombudsman



Berkas gambar: Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia menggelar acara halalihalal bernama seluruh Insan Ombudsman dan tamu undangan di Ruang Akademi kelas 6 Gedung Ombudsman Kurungan Jakarta Selatan, pada Sabtu Lulu lalu. Dalam acara tersebut, Prof. Armanian Rizki selaku Ketua Ombudsman RI, dalam pembukaannya menyatakan bahwa keberagaman adalah kekuatan Ombudsman.

Selanjutnya Armanian menyatakan bahwa Insan Ombudsman memiliki keberagaman dan menjadikannya sebagai kekuatan. "Man jadikan momen ini untuk semakin memperkuat kebersamaan, untuk kemudian membuat kontribusi kita menjadi kekuatan," jelasnya.

Sementara itu salah satu tamu undangan yang menghadiri Anggota Ombudsman periode 2011-2016, Budi Santoso, menyampaikan sambutan bahwa halalihalal merupakan bentuk wujud silaturahmi agar tidak terputus. Budi Santoso sangat mengapresiasi pencapaian hasil yang telah dicapai Ombudsman. "Agresif masyarakat terhadap Ombudsman semakin bagus dan saya ikut senang. Semoga alumni saya sebagai Ombudsman terus berprestasi," ujar Budi Santoso.

Ombudsman mengadakan halalihalal dengan tema "Rangkai Kebersamaan dalam Keberagaman Insan Ombudsman Republik Indonesia" yang dihadiri oleh seluruh Insan Ombudsman dan Rombongan Ombudsman yang berhalalihalal. Turun hadir untuk memberikan Tawafah, Wakil Ketua UII Unswedana Nurhafidza Liana Indonesia, KRI, Wajid Qudus.

KABAR PERWAKILAN

Pengawasan PPDB Jawa Tengah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2019 Cegah Maladministrasi



Berkas gambar: Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan pengawasan Penyerahan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 di tingkat Sekolah Dasar pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2019. Pengawasan PPDB merupakan kegiatan tahunan pencegahan maladministrasi pelayanan publik di sektor Pendidikan. Pelaksanaan inspeksi Tahun 2019 menargetkan pada Penulisan Materi Pendidikan dan Kemudahan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2018

terhadap Penyerahan Peserta Didik Baru pada Tahun Katak-katak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berwawasan jangkauan pengawasan PPDB Tahun 2019 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Risetu Halalihalal, mengaktifkan bahwa dalam pengawasan PPDB Tahun 2019 tingkat Sekolah Dasar, Ombudsman Jalang mengikuti

sampah beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. "Pada umumnya PPDB 2019 tingkat Sekolah Dasar dilakukan secara luring-jaring atau karing," tambah Kun Rocio.

Pelaksanaan sidam sesuai dengan PPDB Tahun 2019 menurut Satuan Pendidikan lebih memudahkan dalam proses seleksi karena tidak ada penalaran yang jelas sejak awal, yaitu melalui 2 kali dan, yang terdiri 7 kali

Namun pengawasan pihak LPTD Dinas Pendidikan tidak memiliki data awal yang memadai mengenai data lapangan dan Surat Pembinaan.

Selain itu, masih banyak murid yang diterima Tim Ombudsman Jalang turut menyampaikan bahwa tidak ada sistem zonasi pada tingkat yang pengawasan, mengungkap yang bisa/wali murid masih memiliki pekerjaan rumah untuk mematuhi ketentuan belajar anaknya, karena

bisa jadi suasana belajar mengajar menjadi lebih santai. Anak-anak yang tertinggal dengan konsentrasi belajar yang tinggi sangat mungkin akan mengantar semangat belajarnya. Ombudsman Jalang juga memfokuskan pengamatan PPDB Tahun 2019 melalui media kanal pengaduan Ombudsman Jalang, pengaduan_jalang@ombudsman.go.id atau melalui WA di 0811 2772 792.

KABAR PERWAKILAN

Politeknik Kotabaru Buka Jurusan Manajemen Pelayanan Publik

Politeknik Kotabaru yang berbasis di Kalimantan Selatan, berencana membuka jurusan baru di bidang Manajemen Pelayanan Publik. Rencana ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan akan urusan lulusan sekolah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menuntut dengan pembelajaran berbasis pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan ikut memperhatikan langkah yang dilakukan Politeknik Kotabaru tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Insan, dalam pertemuan dengan Insan dan Insan Insan yang mengurungi Kantor Ombudsman.

"Harusnya dalam waktu dekat ini akan merencanakan rencana membuka jurusan baru di bidang manajemen pelayanan publik, sebagai salah dalam rangka untuk mempersiapkan kebutuhan publik. Rencana ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan akan urusan lulusan sekolah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menuntut dengan pembelajaran berbasis pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan ikut memperhatikan langkah yang dilakukan Politeknik Kotabaru tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Insan, dalam pertemuan dengan Insan dan Insan Insan yang mengurungi Kantor Ombudsman."

"Harusnya dalam waktu dekat ini akan merencanakan rencana membuka jurusan baru di bidang manajemen pelayanan publik, sebagai salah dalam rangka untuk mempersiapkan kebutuhan publik. Rencana ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan akan urusan lulusan sekolah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menuntut dengan pembelajaran berbasis pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan ikut memperhatikan langkah yang dilakukan Politeknik Kotabaru tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Insan, dalam pertemuan dengan Insan dan Insan Insan yang mengurungi Kantor Ombudsman."

Nurhafidza Nurhafidza, pelayanan publik yang insung-harga harus dimiliki oleh kampus-kampus di negeri ini, sebab kemajuan adalah prasyarat pembaruan. Selain itu, keberagaman pelayanan publik itu seharusnya, dan juga akan mempromosikan pemahaman bagi para mahasiswa sebagai salah pembaruan belajar di masa yang akan datang. Di kalangan Insan, dapat dicontoh oleh kampus-kampus lain di Kalimantan Selatan agar ikut turut andil dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah.

LENSA**UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA**

Ombudsman RI melaksanakan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila pada (06/01). Upacara ini dilakukan di pelataran depan gedung Ombudsman RI dan dipimpin langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai.

**NGABUBURIT BARENG OMBUDSMAN**

Ombudsman RI mengadakan acara "Ngabuburit Bareng Ombudsman" pada (05/23). Acara ini membahas dua isu besar, yakni: Kematian Petugas Pemilu 2019 dan Pelayanan Publik Selama Libur Idulfitri 2019*.

**SUARA OMBUDSMAN****Membangun Pelayanan Publik di Era Disruption 4.0**

Muhammad Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Publik

Kata "disruption" akhir-akhir ini memang laris manis. Tak hanya menjadi bahan sate para dosen di perguruan tinggi, kata disruption juga mulai masuk ke institusi negara serta digunakan di berbagai acara formal atau non-formal. Uniknya, kata ini juga banyak digunakan oleh para milenial yang berusaha menjadi inovator dan membuka usaha baru mereka.

Salah disruption memang sudah banyak dikamalkan oleh tokoh-tokoh dunia, seperti Francis Fukuyama dan Paul Goddard dalam bukunya "The Great Disruption". Di Indonesia, istilah ini lebih banyak dipakai oleh pengamat dan dosen ekonomi ternama. Sebut saja Rhenald Kasali yang menulis buku "Disruption". Kata disruption sendiri berasal dari artikel yang berjudul "Disruptive Technologies, Catching The Wave" yang ditulis oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995.

Simpulannya, disruption memiliki makna yang berarti "gangguan". Dalam semangat literasi, disruption bermakna layaknya suatu inovasi yang "memasak" pasar lama dan mengubah pola terapan pasar baru. Dalam buku yang berjudul "The Innovator's Dilemma", Christensen mencoba menyoroti aspek tipe pelanggan atau konsumen yang sering menuntut akan kualitas suatu produk namun sering memintakan "gangguan" bagi para provider/produser yang dan jasa sehingga dapat menembus lapangan atau terlampau lebar dalam berinovasi.

Selanjutnya, era 4.0 adalah era digital, di mana revolusi industri menuntut tata kelola pemerintahan ke arah yang penuh inovasi, adaptif, dan transparan. Revolusi industri 4.0 juga menuntut pemerintah meningkatkan sistem digitalisasi di seluruh aspek pelayanan seperti e-Budgeting, e-Planning, e-APR, e-Planning, dan lain-lain.

Pemerintah wajib membangun sistem e-Government baik dari pusat sampai daerah, masuk ke seluruh kalembagaan, memperkuat teknologi dan komunikasi, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas maupun transparansi dalam konteks pelayanan publik.

Walaupun sudah zaman jaja pelayanan publik yang lami, bertubi-tubi, jauh dari kemudahan apalagi diskrinernasi, termasuk para ASN atau penyelenggara negara yang membuat-membuat masih kaku, tidak reformasi, gaptek, serta masih kereci atau inovatif. Apabila masih terbelit, koreksinya-juga di era ini akan semakin terbelit-jauh lami dengan sendirinya akan "menangis" atau menangis.

Poin mendasar dari pelayanan publik di era disruption 4.0 adalah komunikasi untuk membaca selera gerakan yang terbelit dan tidak terbelit, mengantisipasi "ketertinggalan" dan kesiapan perubahan zaman serta secara sadar mampu memahami keinginan pelanggan ("nyak") termasuk berani dan mampu berinovasi secara besar.

Kita sudah merasakan bersama bahwa perubahan pelayanan publik di era disruption 4.0 baik dalam administrasi, barang, dan jasa hingga terma layanan. Beberapa di antaranya seperti transportasi publik angkat dan objek konvensional yang sudah bergeser jadi transportasi berbasis online. Alasannya pun sudah mulai ke arah itu, yaitu reformasi, gaptek, serta masih kereci atau inovatif. Pelayanan administratif berbasis sate, jari atau digital menjadikan layanan berbasis kerta menjadi sangat lami. Bermunculan aplikasi yang memudahkan masyarakat, di mana semua fasilitas tersebut bisa didapatkan dengan mudah hanya melalui smartphone saja. Ini semua harus segera kead dari pengaruh disruption atau pelayanan publik di masa kini.

Orientasi dan harapan publik atau pelayanan yang lebih cepat, sederhana, mudah, terjangkau dan sebagai akibatnya ini menjadi satu kenakayan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan (pemerintah). Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan keluhan masyarakat. Menerusi kembali sangat ketepatan serta menaruh minat sumber daya manusia dan mendeskrip di tahun pelayanan publik atau menjadi satu kenakayan yang harus dibuktikan. Pendekatan berbasis teknologi mampu meningkatkan sisi kemanusiaan (profesional) juga harus menjadi pedoman bagi tindakan pemerintahan atau pemerintahan layanan publik.

Berlatangnya era disruption 4.0 tak hanya menggranggrai pemerintahan yang bersih dan baik, tetapi pemerintahan yang jujur, adil, dan bisa membaca kebutuhan masyarakat. Di sisi lain pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik juga sebagai perancang agar semua elemen koruptif secara sistem menuju kualitas pelayanan. Untuk pemerintahan yang lebih baik, maka perlu ada inovasi dalam layanan, melibatkan publik untuk bersama membuat keadilan atau kepentingan-kepentingan rakyat dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambatkan.

Lebih dalam dari itu pemerintahan diperlukan seperti apa-nya sebagai vitamin atau mampu menyimpulkan semangat berinovasi, kreatif, dan kreatif dalam upaya membarukan semangat publik. Gaya pemerintahan yang lebih fleksibel dan tidak kaku menjadi satu motivasi untuk terwujudnya program, pertumbuhan bagi masyarakat serta menaruh perhatian secara manusiawi melakukan dibingkai dengan keagungan teknologi.

Pada akhirnya era disruption ini menuntut penyelenggara pelayanan publik yang mampu dan cerdas dalam mengatasi setiap persoalan atau masalah yang akan muncul ke depan. Serta memiliki target tercapainya prinsip keabsahan, transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, menuju indeks ketidakhadiran bagi masyarakat serta menaruh perhatian secara manusiawi melakukan dibingkai dengan keagungan teknologi.